



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 23 (dua puluh tiga)
Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM).
Hari, Tanggal	: Kamis, 8 September 2022
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Mohamad Hekal., M.B.A/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Menteri BUMN RI : <ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan RKA-K/L dan PMN Tahun Anggaran 2023 serta tambahan PMN 2022;2. Pembahasan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022;3. Kinerja keuangan BUMN terutama yang berdampak utang luar negeri. Menteri Investasi/BKPM RI : <ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan RKA-K/L TA 2023;2. Progress Investasi tahun 2021 dan 2022;3. Pembahasan pelaksanaan anggaran TA 2022.
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. 43 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI;2. Menteri BUMN RI, Saudara Erick Thohir;3. Menteri Investasi/BKPM RI, Saudara Bahlil Lahadalia. Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI dan Menteri Investasi/BKPM RI pada pukul 10.39 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 8 September 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal., M.B.A.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menyetujui penjelasan dari Menteri BUMN RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Pagu Anggaran Kementerian BUMN RI tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp260.404.494.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Miliar Empat Ratus Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai sesuai dengan Nota Keuangan per tanggal 16 Agustus 2022 untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.313.200.000.000 (*Empat Puluh Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*) ditambah alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi sebesar Rp5.700.000.000.000 (*Lima Triliun Tujuh Ratus Miliar Rupiah*). Terkait rincian penerima dan besaran PMN, Komisi VI DPRI RI akan melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran.
3. Komisi VI DPR RI mendukung usulan tambahan alokasi PMN tahun 2023 Kementerian BUMN RI sebesar Rp7.880.000.000.000 (*Tujuh Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*) untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Dukungan Keberlangsungan Bisnis BUMN. Terkait rincian alokasi PMN, Komisi VI DPRI RI akan melakukan pendalaman dengan masing-masing BUMN calon penerima PMN.
4. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI untuk meningkatkan realisasi Anggaran 2022 mengingat realisasi anggaran baru 61,24% dari total pagu Rp208.240.000.000 (*Dua Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi/BKPM RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Pagu Anggaran Kementerian Investasi/BKPM RI tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp1.094.222.046.000 (*Satu Triliun Sembilan Puluh Empat Miliar Dua ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*).
6. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi/BKPM RI sebesar Rp792.387.823.000 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

7. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi/BKPM RI untuk dapat mewujudkan target Investasi tahun 2023 sesuai rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 senilai Rp1.400.000.000.000.000 (*Seribu Empat Ratus Triliun Rupiah*).
8. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi/BKPM RI untuk meningkatkan realisasi Investasi 2022 mengingat realisasi Investasi hingga Juni 2022 baru 48,7% dari target Presiden RI sebesar Rp1.200.000.000.000.000 (*Seribu Dua Ratus Triliun Rupiah*).
9. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi/BKPM RI untuk meningkatkan realisasi Anggaran 2022 mengingat realisasi anggaran baru 66,01% dari total pagu Rp1.304.529.184.000 (*Satu Triliun Tiga Ratus Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
10. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI dan Kementerian Investasi/BKPM RI untuk memberikan jawaban tertulis dengan lebih detail dan dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.26 WIB.

MENTERI BUMN RI

Ttd.

ERICK THOHIR

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MOHAMAD HEKAL., M.B.A
A-103**

MENTERI INVESTASI/BKPM RI

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

